

Model Kewirausahaan Sosial Peternak sebagai Strategi Responsi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Ekosistem Swasembada Pangan

Arif Rahman Azis^{1*}, Woki Bilyaro¹, Muhammad Dani¹, Nurazizah Ramadhanti¹, Rizky Amrullah Chaniago¹, Jarmuji¹, Kade Wahyu Saputri², Anis Indayati², Muhammad Subhan Hamka³

¹Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

²Program Studi Teknologi Produksi Ternak Unggas, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong

³Program Studi Budidaya Perikanan Air Tawar, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong

Email: arifrahmanaziz@unib.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) berskala besar, yang menciptakan disrupsi signifikan pada ekosistem peternakan rakyat. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan model kewirausahaan sosial bagi peternak sebagai strategi responsif terhadap peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh PSN. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan panduan protokol PRISMA untuk mensintesis literatur relevan mengenai PSN, kewirausahaan sosial di sektor agribisnis, dan strategi adaptasi peternak. Hasil analisis menunjukkan bahwa PSN memiliki dampak ganda di satu sisi membuka akses terhadap infrastruktur dan pasar baru, namun di sisi lain berisiko memmarginalkan peternak kecil melalui kompetisi dan alienasi lahan. Model kewirausahaan sosial yang diusulkan mengintegrasikan empat fungsi strategis (1) integrasi rantai nilai, (2) agregasi sumber daya dan peningkatan kapasitas, (3) advokasi kebijakan dan negosiasi, serta (4) inovasi dan praktik berkelanjutan. Kesimpulannya, model ini menawarkan kerangka kerja proaktif yang dapat mentransformasi peternak dari penerima kebijakan yang pasif menjadi agen perubahan yang aktif, sehingga mampu menyelaraskan tujuan ketahanan pangan nasional dengan penguatan resiliensi ekonomi, sosial, dan ekologis di tingkat komunitas.

Kata kunci: Kewirausahaan sosial, Peternak, Proyek strategis nasional, Swasembada pangan, Resiliensi

Abstract

The Indonesian government targets food self-sufficiency through large-scale National Strategic Projects (PSN), which create significant disruptions to the smallholder livestock ecosystem. This article aims to develop a social entrepreneurship model for livestock farmers as a responsive strategy to the opportunities and challenges posed by PSN. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol to synthesize relevant literature on PSN, social entrepreneurship in the agribusiness sector, and farmer adaptation strategies. The analysis shows that PSN has a dual impact: on one hand, it opens access to new infrastructure and markets, but on the other hand, it risks marginalizing small-scale farmers through competition and land alienation. The proposed social entrepreneurship model integrates four strategic functions (1) value chain integration, (2) resource aggregation and capacity building, (3) policy advocacy and negotiation, and (4) innovation and sustainable practices. In conclusion, this model offers a proactive framework that can transform farmers from passive policy recipients into active agents of change, thereby aligning national food security goals with the strengthening of economic, social, and ecological resilience at the community level.

Keywords: Social entrepreneurship, Livestock farmers, National strategic project, Food self-sufficiency, Resilience

PENDAHULUAN

Imperatif nasional untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan telah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan di Indonesia. Ambisi untuk tidak hanya mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia (*world food barn*), mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan berskala masif. Fokus pada hal ini, program Food Estate yang dikembangkan di berbagai wilayah dengan total ratusan ribu hektar dan usulan 21 lokasi PSN baru untuk peternakan sapi potong dan perah menjadi manifestasi nyata dari strategi tersebut (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2024).

Namun, di balik ambisi besar tersebut, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang yang signifikan. Sejarah implementasi proyek pertanian skala besar di Indonesia, termasuk program food estate sebelumnya, sarat dengan tantangan dan kegagalan (Hidranto, 2024). Berbagai studi mendokumentasikan permasalahan fundamental seperti pengelolaan lahan yang tidak tepat, kerusakan lingkungan, konflik sosial akibat minimnya partisipasi masyarakat lokal, serta ketidaksesuaian dengan kondisi sosio-kultural setempat. Di subsektor peternakan, tantangan ini diperparah oleh masalah struktural yang belum terselesaikan, seperti rendahnya produktivitas usaha pembibitan sapi yang disebabkan oleh margin keuntungan yang tipis, perputaran modal yang lambat, dan risiko usaha yang tinggi, sehingga tidak menarik bagi investor maupun peternak untuk berkembang (Fatahullah & Hilmi, 2024). Pendekatan PSN yang cenderung seragam dan terpusat seringkali gagal mengakomodasi kompleksitas ini, berisiko mengulang kesalahan masa lalu dan memenggirkan peternak rakyat yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan top-down, paradigma kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) menawarkan alternatif bottom-up yang menjanjikan. Kewirausahaan sosial didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan prinsip bisnis dengan misi sosial untuk menciptakan solusi berkelanjutan atas permasalahan sosial dan lingkungan (Mulyaningrum & Rusliati, 2019). Dari perspektif agribisnis, model ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan bagi komunitas (Avetisyan *et al.*, 2023). Dengan beroperasi sebagai agen perubahan, wirausaha sosial di sektor pertanian fokus pada pemberdayaan masyarakat, inovasi, dan adaptasi berkelanjutan untuk membangun sistem pangan yang lebih adil dan tangguh.

Meskipun peternak secara individu telah lama menerapkan berbagai strategi adaptasi untuk merespons tekanan kebijakan dan perubahan lingkungan (Salam *et al.*, 2025), upaya ini seringkali bersifat reaktif, terfragmentasi, dan berskala kecil, sehingga tidak cukup kuat untuk menghadapi disrupsi masif yang diakibatkan oleh PSN. Terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam merumuskan sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan proaktif bagi peternak untuk secara kolektif menavigasi ekosistem baru yang dibentuk oleh PSN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan sebuah model konseptual kewirausahaan sosial peternak. Model ini dirancang sebagai strategi responsif yang memungkinkan peternak untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga secara strategis memanfaatkan peluang dan memitigasi risiko yang muncul dari implementasi PSN dalam upaya mencapai swasembada pangan.

METODE

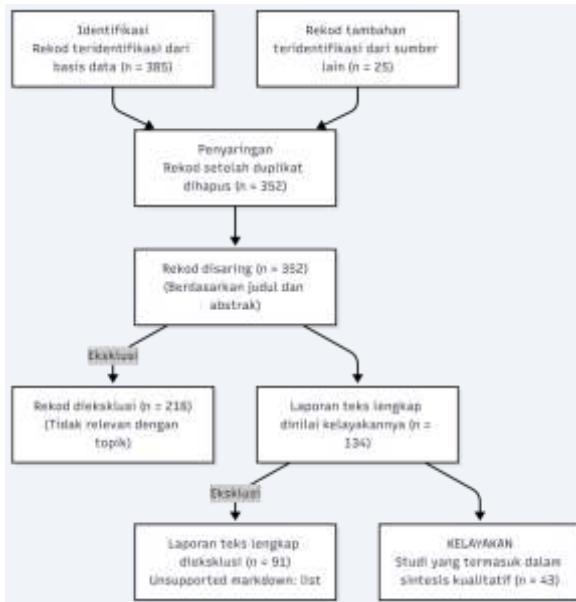
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dipilih karena sifatnya yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dalam mensintesis bukti-bukti dari berbagai literatur akademis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Proses peninjauan literatur ini secara ketat mengikuti panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk memastikan kualitas dan validitas tinjauan.

Proses pencarian dan seleksi literatur dilakukan melalui empat tahapan PRISMA. Tahap pertama, Identifikasi, dilakukan dengan pencarian komprehensif pada basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect, serta repositori institusional. Kata kunci yang digunakan adalah kombinasi istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, antara lain: ("kewirausahaan sosial" OR "social entrepreneurship") AND ("peternak" OR "livestock farmer" OR "agribisnis" OR "agriculture") AND ("proyek strategis nasional" OR "national strategic project" OR "food estate") OR ("swasembada pangan" OR "food self-sufficiency") OR ("kebijakan pemerintah" OR "government policy")) AND "Indonesia".

Tahap kedua, Penyaringan (*Screening*), meliputi penghapusan artikel duplikat dan peninjauan judul serta abstrak dari semua artikel yang teridentifikasi. Artikel yang secara jelas berada di luar lingkup penelitian, seperti yang tidak relevan dengan konteks pertanian atau hanya membahas aspek teknis murni tanpa dimensi sosio-ekonomi, dieksklusi pada tahap ini.

Tahap ketiga, Kelayakan (*Eligibility*), melibatkan penilaian teks lengkap dari artikel yang tersisa berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi adalah (a) artikel yang dipublikasikan antara tahun 2012 hingga 2025 untuk menangkap perkembangan kebijakan terkini; (b) berfokus pada kewirausahaan sosial di sektor pertanian/peternakan; (c) membahas PSN, kebijakan ketahanan pangan, atau proyek pertanian skala besar di Indonesia; dan (d) menganalisis strategi adaptasi peternak atau respons komunitas terhadap kebijakan. Kriteria eksklusi adalah (a) artikel opini atau non-peer-reviewed; (b) studi yang tidak relevan dengan konteks Indonesia atau negara berkembang yang sebanding; dan (c) artikel di mana topik kewirausahaan sosial atau respons peternak hanya menjadi bahasan periferal.

Tahap keempat, Inklusi, adalah tahap akhir di mana artikel-artikel yang memenuhi semua kriteria dimasukkan ke dalam sintesis kualitatif. Seluruh proses seleksi ini didokumentasikan dan divisualisasikan dalam diagram alir PRISMA (Gambar 1). Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sintesis tematik. Data yang relevan dari setiap artikel yang terpilih diekstraksi dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan hubungan yang berulang. Tema-tema ini kemudian dianalisis dan diintegrasikan untuk membangun model konseptual yang disajikan pada bagian pembahasan.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA Proses Seleksi Literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) Swasembada Pangan: Skala, Ambisi, dan Realitas Lapangan

Analisis literatur menunjukkan bahwa PSN di sektor pangan dan peternakan merupakan intervensi negara yang dimobilisasi dengan skala dan ambisi yang luar biasa. Program Food Estate, misalnya, dirancang sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahan seluas ratusan ribu hektar, dengan tujuan meningkatkan produktivitas secara signifikan dan menyerap tenaga kerja lokal. Target penambahan hingga 4 juta hektar lahan panen pada tahun 2029 serta penetapan 21 lokasi PSN baru untuk peternakan sapi menggaris bawahi komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi struktural pada lanskap pertanian nasional. Proyek-proyek ini menjanjikan dampak pengganda (*multiplier effect*) melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan, dan akses energi, yang secara teoretis dapat meningkatkan efisiensi dan membuka akses pasar bagi petani (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Namun, ambisi ini berbenturan dengan realitas lapangan yang kompleks dan seringkali kontra-produktif. PSN berfungsi sebagai "kejutan" eksternal yang kuat bagi ekosistem pertanian lokal, menciptakan sebuah dualitas antara peluang dan ancaman. Di satu sisi, kehadiran infrastruktur baru dapat menjadi peluang. Di sisi lain, pendekatan top-down yang masif ini membawa ancaman serius. Kegagalan program swasembada daging sapi di masa lalu menunjukkan bahwa penetapan target nasional tanpa mengatasi masalah fundamental di tingkat peternak, seperti ketidaklayakan ekonomi usaha pembibitan, terbukti tidak efektif (Purwoko, 2016). Proyek skala besar seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat lokal, yang berujung pada konflik agraria, kerusakan ekologis, dan kegagalan program itu sendiri. Peternak kecil, yang merupakan mayoritas, berada dalam posisi rentan karena harus bersaing dengan korporasi besar yang mungkin difasilitasi oleh PSN, menghadapi potensi kehilangan akses terhadap lahan, dan terpaksa beradaptasi dengan sistem pasar baru yang tidak selalu menguntungkan mereka. Dengan demikian, PSN tidak dapat dilihat secara monolitik sebagai program yang "baik" atau "buruk", melainkan sebagai disruptor kompleks yang menciptakan lingkungan yang lebih bergejolak, di mana posisi strategis menjadi kunci untuk bertahan hidup dan berkembang.

Kewirausahaan Sosial sebagai Paradigma Pembangunan Agribisnis Inklusif

Sebagai antitesis dari pendekatan *top-down* PSN, kewirausahaan sosial menawarkan paradigma pembangunan yang berakar pada komunitas dan berorientasi pada keberlanjutan. Konsep ini secara fundamental mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, bukan hanya nilai pribadi atau keuntungan semata (Mulyaningrum & Rusliati, 2019). Wirausaha sosial bertindak sebagai agen perubahan yang secara aktif mengidentifikasi peluang untuk berinovasi dan beradaptasi demi mencapai misi sosial tersebut. Berbeda dari organisasi nirlaba tradisional, entitas kewirausahaan sosial menghasilkan pendapatan dari aktivitas perdagangan, yang memastikan kemandirian finansial. Namun, berbeda dari bisnis komersial murni, prioritas utamanya adalah pemenuhan tujuan sosial atau lingkungan, di mana keuntungan yang dihasilkan diinvestasikan kembali untuk pengembangan komunitas (Bílková *et al.*, 2018).

Dalam sektor agribisnis, beberapa model kewirausahaan sosial telah terbukti relevan. Salah satunya adalah *Inclusive Business Models* (IBMs), yang bertujuan untuk mengintegrasikan petani kecil ke dalam rantai nilai secara adil dan saling menguntungkan. 28 IBMs fokus pada pembangunan kapasitas, penyediaan akses pasar dan keuangan, serta pembagian risiko yang adil (Baltenweck *et al.*, 2022). Model lain yang efektif adalah organisasi berbasis komunitas seperti koperasi multiproduk (koperasi multiproduk). Model ini memungkinkan peternak untuk secara kolektif mengelola berbagai potensi peternakan (sapi, ayam, kambing) dan melakukan pengolahan pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah produk, seperti mengolah susu menjadi produk turunan, daging menjadi olahan, dan sebagainya (Zang *et al.*, 2020). Keberhasilan model-model ini sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun aksi kolektif, memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial didistribusikan secara merata di seluruh komunitas.

Tabel 1 merangkum bukti empiris terbaru tentang bagaimana koperasi yang mengintegrasikan berbagai lini usaha bukan hanya memperkuat rantai nilai, tetapi juga menaikkan kinerja hulu–hilir peternak. Empat dimensi kunci ditunjukkan (1) adopsi teknologi, yakni percepatan penggunaan inovasi pascapanen dan peningkatan efisiensi produksi; (2) nilai tambah produk, melalui diversifikasi olahan yang mendorong pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga; (3) aksi kolektif, berupa penguatan kerjasama, mekanisme berbagi risiko, serta akses yang lebih luas ke pembiayaan; dan (4) akses pasar, yang memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing

produk. Secara sistematis, temuan-temuan dalam tabel menegaskan bahwa model koperasi multiproduk bertindak sebagai pengungkit kelembagaan yang menyinergikan inovasi, koordinasi, dan penetrasi pasar, menciptakan ekosistem usaha ternak yang lebih tangguh dan berorientasi nilai.

Tabel 1. Dampak Koperasi Multiproduk pada Peternakan

Aspek	Dampak Utama	Sumber
Adopsi teknologi	Meningkatkan penggunaan teknologi pascapanen dan efisiensi produksi	(Zhang et al., 2020; Toldrá et al., 2021; Can & Engindeniz, 2025)
Nilai tambah produk	Diversifikasi produk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi	(Alvarez et al., 2021; García-Cornejo et al., 2020; De Herde et al., 2020)
Aksi kolektif	Memperkuat kerjasama, pembagian risiko, dan akses pembiayaan	(Zhu & Wang, 2024; Abraham et al., 2022; Zang et al., 2022)
Akses pasar	Memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk	(Can & Engindeniz, 2025; Abraham et al., 2022; Alvarez et al., 2021)

Dari Adaptasi Reaktif ke Aksi Proaktif: Transformasi Strategi Peternak

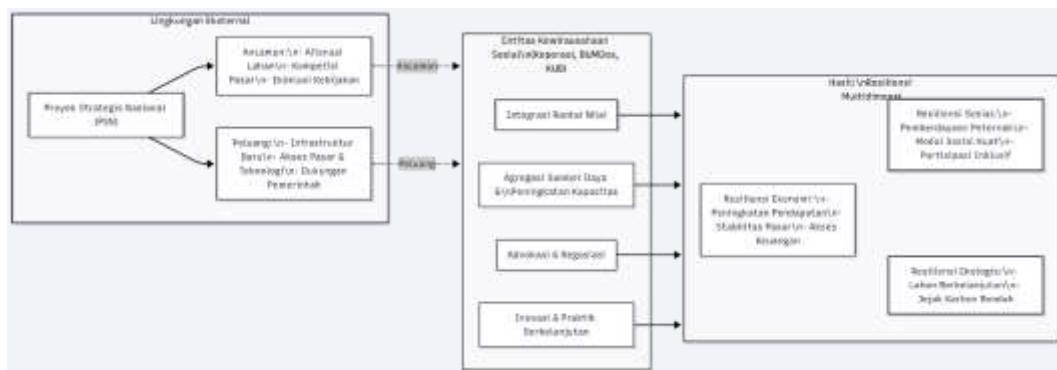
Menghadapi tekanan eksternal, baik dari kebijakan pemerintah maupun perubahan iklim, peternak tidaklah pasif. Literatur mengidentifikasi beragam strategi adaptasi yang mereka terapkan. Strategi ini dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi yaitu ekologis, ekonomi, dan social (Imelda & Hidayat, 2024). Secara ekologis, peternak melakukan diversifikasi tanaman pakan, pengelolaan air, atau memilih jenis ternak yang lebih tahan banting (Bahri & Tiesnamurti, 2012). Secara ekonomi, mereka mendiversifikasi sumber pendapatan di luar peternakan, mencari akses kredit, atau menyesuaikan skala usaha (Mei *et al.*, 2021). Secara sosial, mereka memperkuat jaringan informal dengan sesama peternak dan mencari informasi dari penyuluh (Mulyono *et al.*, 2012).

Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa strategi-strategi ini sebagian besar bersifat reaktif, individual, dan terfragmentasi. Peternak merespons perubahan setelah terjadi, dan tindakan yang diambil seringkali terbatas pada kapasitas rumah tangga masing-masing (Bahri & Tiesnamurti, 2012). Meskipun penting untuk kelangsungan hidup jangka pendek, adaptasi yang terfragmentasi ini memiliki daya tawar dan dampak sistemik yang rendah. Mereka mungkin dapat mengatasi masalah sesaat, tetapi tidak mampu mengubah struktur yang menyebabkan kerentanan mereka. Di sinilah model kewirausahaan sosial memainkan peran transformatifnya. Kewirausahaan sosial berfungsi sebagai kendaraan untuk mengagregasi, memformalkan, dan mengangkat adaptasi-adaptasi

individual ini menjadi sebuah respons kolektif yang proaktif dan strategis. Model ini tidak menciptakan perilaku baru dari nol, melainkan menyediakan struktur organisasi yang dapat memperkuat dan menskalakan upaya yang sudah ada. Sebagai contoh, strategi individu "mencari kredit" ditransformasikan menjadi "akses pembiayaan kolektif melalui koperasi"; adaptasi "mencoba pakan baru" menjadi "pengembangan pakan inovatif berbasis riset bersama"; dan jaringan sosial informal "bertukar informasi dengan tetangga" menjadi "forum advokasi formal untuk negosiasi kebijakan". Dengan demikian, kewirausahaan sosial mengubah strategi bertahan hidup (*coping*) menjadi strategi pembangunan (*strategic development*).

Model Kewirausahaan Sosial Peternak yang Responsif dan Terintegrasi

Berdasarkan sintesis literatur, model konseptual kewirausahaan sosial peternak yang responsif terhadap PSN dapat dibangun. Model ini bersifat dinamis dan terintegrasi, menggambarkan bagaimana sebuah entitas usaha sosial yang dipimpin peternak dapat secara strategis menavigasi ekosistem PSN untuk mencapai resiliensi. Model ini terdiri dari lingkungan eksternal, entitas pusat, fungsi strategis, dan hasil yang diharapkan, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Konseptual Kewirausahaan Sosial Peternak Responsif PSN

Elaborasi Model

Integrasi rantai nilai adalah inti dari kegiatan ekonomi entitas. Ini mencakup kegiatan kolektif mulai dari pengadaan input (pakan, bibit) dengan harga lebih murah, pengolahan pascapanen untuk menciptakan nilai tambah (misalnya, pasteurisasi susu, pengolahan daging), hingga pemasaran bersama dengan merek kolektif. Dengan mengintegrasikan rantai nilai, peternak dapat menangkap margin keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan daya saing mereka terhadap pelaku pasar yang lebih besar, secara langsung merespons tantangan dan peluang pasar yang diciptakan oleh PSN.

Agregasi sumberdaya dan peningkatan kapasitas merupakan entitas sosial yang berfungsi sebagai platform untuk mengumpulkan (*pooling*) sumber daya yang tersebar, seperti modal, lahan, dan tenaga kerja. Lebih dari itu, ia menjadi pusat pembelajaran kolektif, memfasilitasi pelatihan mengenai teknologi modern, manajemen usaha, praktik biosecuriti yang baik, dan pengembangan pakan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini membangun kekuatan internal kolektif yang memungkinkan peternak untuk mengadopsi inovasi dan memenuhi standar pasar yang lebih tinggi.

Advokasi kebijakan dan negosiasi sebagai bentuk fungsi strategis yang membedakan model ini dari sekadar kelompok usaha biasa. Sebagai badan hukum formal yang mewakili banyak peternak, entitas ini memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk berdialog dan bernegosiasi dengan pelaksana PSN, pemerintah daerah, dan investor swasta. Mereka dapat mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada peternak kecil, memastikan keterlibatan mereka dalam perencanaan PSN, dan menegosiasikan skema kemitraan yang adil. Fungsi ini secara proaktif bertujuan untuk "memasukkan" kepentingan peternak ke dalam kerangka kebijakan yang lebih besar, sebuah proses yang disebut mainstreaming, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek tetapi subjek pembangunan.

Inovasi dan praktik berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, entitas ini mendorong inovasi yang sesuai dengan konteks lokal dan prinsip ekologis. Ini bisa berupa pengembangan sistem pertanian terpadu (integrasi ternak-tanaman) untuk efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah menjadi produk bernilai seperti biogas, atau pelestarian dan pengembangan sumber daya genetik ternak lokal yang memiliki keunggulan adaptif. Fungsi ini tidak hanya membangun resiliensi ekologis tetapi juga dapat menciptakan proposisi nilai unik di pasar.

Keempat fungsi ini saling terkait dan saling memperkuat. Keberhasilan dalam integrasi rantai nilai menyediakan sumber daya finansial untuk peningkatan kapasitas dan inovasi. Peningkatan kapasitas dan inovasi memperkuat posisi tawar dalam advokasi. Dan advokasi yang berhasil membuka ruang kebijakan yang lebih kondusif bagi pengembangan usaha. Hasil akhirnya adalah resiliensi multidimensi (ekonomi, sosial, dan ekologi) yang memungkinkan komunitas peternak untuk berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mencapai swasembada pangan, meskipun didasari oleh tujuan nasional yang penting, secara inheren menciptakan

ekosistem yang kompleks, dinamis, dan penuh tantangan bagi peternak rakyat. Merespons disruptif ini dengan strategi adaptasi yang pasif, individual, dan terfragmentasi terbukti tidak memadai untuk membangun ketahanan jangka panjang. Artikel ini, melalui tinjauan literatur sistematis, mengusulkan sebuah model kewirausahaan sosial peternak sebagai kerangka kerja responsif yang proaktif dan terintegrasi. Model ini mentransformasi peternak dari posisi sebagai penerima kebijakan yang rentan menjadi aktor sentral yang mampu secara kolektif memitigasi risiko sekaligus menangkap peluang yang dihadirkan oleh PSN. Dengan mengintegrasikan fungsi ekonomi (integrasi rantai nilai), sosial (agregasi sumber daya dan advokasi), dan ekologis (inovasi berkelanjutan), model ini menawarkan jalur konkret untuk menyelaraskan agenda makro swasembada pangan dengan agenda mikro pembangunan komunitas yang berdaya, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dirumuskan untuk para pemangku kepentingan diantaranya 1) untuk Pembuat Kebijakan, Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk secara aktif mengintegrasikan model kewirausahaan sosial berbasis komunitas ke dalam desain dan implementasi PSN. Alih-alih hanya berfokus pada investasi skala besar dari korporasi, kebijakan perlu menciptakan ruang fiskal dan regulasi yang kondusif, seperti skema kemitraan prioritas dan insentif khusus, yang secara eksplisit mendukung dan melibatkan koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikelola oleh peternak lokal; 2) untuk Praktisi dan Lembaga Pendamping, Organisasi non-pemerintah, penyuluh pertanian, dan akademisi perlu menggeser fokus pendampingan dari sekadar bantuan teknis atau hibah jangka pendek ke fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan wirausaha sosial. Program pendampingan harus mencakup pelatihan dalam manajemen bisnis, literasi keuangan, kepemimpinan, dan keterampilan negosiasi untuk memberdayakan kelompok peternak agar mampu mengelola usaha mereka secara profesional dan mandiri; 3) untuk Akademisi dan Peneliti, model konseptual yang diusulkan dalam artikel ini memerlukan validasi dan pengujian empiris lebih lanjut. Penelitian di masa depan perlu dilakukan untuk menguji efektivitas model ini di berbagai konteks PSN yang berbeda di seluruh Indonesia. Studi longitudinal yang mengukur dampak multidimensional (ekonomi, sosial, ekologis) dari implementasi model kewirausahaan sosial ini akan memberikan bukti kuat yang dapat menginformasikan kebijakan dan praktik pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M., Chiu, L., Joshi, E., Ilahi, M., & Pingali, P. (2022). Aggregation models and small farm commercialization – A scoping review of the global literature. *Food Policy*, 110, 102299. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102299>
- Alvarez, A., García-Cornejo, B., Pérez-Méndez, J. A., & Roibás, D. (2021). Value-creating strategies in dairy farm entrepreneurship: A case study in Northern Spain. *Animals*, 11(9), 2522. <https://doi.org/10.3390/ani11092522>
- Avetisyan, T., Ross, R. B., & Wright, W. (2023). Social entrepreneurship in agri-food systems: The case of food hubs. *International Food and Agribusiness Management Review*, 26(4), 641–654. <https://doi.org/10.22434/ifamr2022.0043>
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2024, 31 Oktober). *Evaluasi manfaat infrastruktur Kementerian PUPR: Sebuah upaya perbaikan berkelanjutan*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://bpwi.pu.go.id/artikel/evaluasi-manfaat-infrastruktur-kementerian-pupr-sebuah-upaya-perbaikan-berkelanjutan>
- Bahri, S., & Tiesnamurti, B. (2012). Strategi pembangunan peternakan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 31(4), 142–152.
- Baltenweck, I., Ouma, E. A., & Nagujja, J. (2022). Gender-inclusive business models in livestock value chains in low- and middle-income countries: What can we learn from the literature? *Frontiers in Sustainability*, 3, 958251. <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.958251>
- Bílková, R., Balcerová, M., Prášilová, M., & Vávra, J. (2018). Social entrepreneurship in agriculture, a sustainable practice for social and economic cohesion in rural areas: The case of the Czech Republic. *European Countryside*, 10(3), 377–397. <https://doi.org/10.2478/euco-2018-0021>
- Can, B., & Engindeniz, S. (2025). The effects on milk marketing of cooperative partnership of dairy farmers: A case study from Türkiye. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8, 1451687. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1451687>
- De Herde, V., Baret, P. V., & Maréchal, K. (2020). Coexistence of cooperative models as structural answer to lock-ins in diversification pathways: The case of the Walloon dairy sector. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4, 584542. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.584542>
- Fatahullah, A., & Hilmi, M. A. (2024). Food Estate: Ancaman ataukah peluang bagi ketahanan pangan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 8(4), 1313–1326.
- García-Cornejo, B., Pérez-Méndez, J. A., Roibás, D., & Wall, A. (2020). Efficiency and sustainability in farm diversification initiatives in Northern Spain. *Sustainability*, 12(24), 10398. <https://doi.org/10.3390/su122410398>

- Hidranto, F. (2024, 17 Desember). *Mewujudkan asa swasembada pangan*. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8839/mewujudkan-asaswasembada-pangan?lang=1>
- Imelda, & Hidayat, R. (2024). Climate change impacts, adaptation and mitigation in the agricultural sector. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 10(3), 1457–1476. <https://doi.org/10.22034/gjesm.2024.03.30>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, 7 Februari). *Selain menjadi upaya pemeratan pembangunan di seluruh wilayah, Proyek Strategis Nasional juga mampu berikan dampak multiplier effect*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5631/selain-menjadi-upaya-pemeratan-pembangunan-di-seluruh-wilayah-proyek-strategis-nasional-juga-mampu-berikan-dampak-multiplier-effect>
- Mei, R. Y. T. M., Ridwan, M. R., & Anindita, W. A. A. (2021). Peran kewirausahaan sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan (Kasus Tani Muda di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 18(1), 59–70. <https://doi.org/10.17358/JMA.18.1.59>
- Mulyaningrum, & Rusliati, E. (2019). Membangun kewirausahaan sosial sektor agribisnis sebagai inovasi peluang kerja di pedesaan: Studi kasus pada usaha jamur “Saung Suung Yuceu” Majalengka. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia: Pengembangan Budaya Penelitian Menuju Indonesia 4.0* (hlm. 193–202).
- Mulyo, I. T., Marzuki, S., & Santoso, S. I. (2012). Analisis kebijakan pemerintah mengenai budidaya sapi potong di Kabupaten Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 1(2), 266–277.
- Purwoko, P. (2016). Peran kebijakan fiskal dalam peningkatan produktivitas pembibitan sapi nasional. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 19(2), 137–156. <https://doi.org/10.31685/kek.v19i2.137>
- Salam, S., Thilagam, J., Fernandaz, C. C., Senthilkumar, M., Karthikeyan, C., & Murugan, P. P. (2025). Unleashing the future prospects of agricultural entrepreneurship: A systematic literature review. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JEEE-12-2024-0567>
- Toldrá, F., Reig, M., & Mora, L. (2021). Management of meat by- and co-products for an improved meat processing sustainability. *Meat Science*, 181, 108608. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108608>
- Zang, L., Wang, Y., Ke, J., & Su, Y. (2022). What drives smallholders to utilize socialized agricultural services for farmland scale management? Insights from the perspective of collective action. *Land*, 11(6), 930. <https://doi.org/10.3390/land11060930>
- Zhang, S., Sun, Z., Ma, W., & Valentinov, V. (2020). The effect of cooperative membership on agricultural technology adoption in Sichuan, China. *China Economic Review*, 62, 101334. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101334>

Zhu, X., & Wang, G. (2024). Impact of agricultural cooperatives on farmers' collective action: A study based on the socio-ecological system framework. *Agriculture*, 14(1), 96. <https://doi.org/10.3390/agriculture14010096>